

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nahdhatul Ulama dapat diartikan kebangkitan para ulama. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai suatu *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* yang berarti Organisasi Keagamaan Islam, yang bertujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah guna terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat.¹ Sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mungkin NU bersikap antipolitik. Politik kenegaraan untuk menjaga keutuhan NKRI dan politik kerakyatan untuk menjunjung tinggi kemaslahatan rakyat merupakan bagian esensial dari komitmen NU sebagai kekuatan sosial dan moral bangsa. Strategi politik NU adalah melalui advokasi kebijakan publik baik dalam sistem perundang-undangan hukum dan regulasi-regulasi lainnya, di berbagai level, baik di daerah maupun pusat. Hal ini dipastikan dalam forum-forum bahtsul masail di Mukhtamar NU.²

Mukhtamar Nahdlatul Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam struktur organisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara periodik setiap lima tahun sekali. Forum ini tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, melainkan menjadi ruang konsolidasi nasional yang mempertemukan seluruh unsur kepengurusan, mulai dari tingkat pusat, pengurus wilayah (PWNU), hingga pengurus cabang (PCNU) dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran para delegasi dari berbagai tingkatan tersebut mencerminkan karakter NU sebagai jam'iyah yang berbasis pada struktur

1 Abdul Wahib dkk, Materi Dasar Nahdhatul Ulama ahlussunnah Wal Jamaah, LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2004.

2 <https://nu.or.id/topik/mukhtamar-nu-sejarah-makna-dan-dinamikanya> diakses pada 8 November 2023, pukul 22.07 WIB.

kolektif dan tradisi musyawarah. Dengan demikian, muktamar bukan hanya forum administratif, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kesinambungan kepemimpinan dalam tubuh organisasi.³

Selain dihadiri oleh unsur kepengurusan formal, muktamar juga melibatkan para alim ulama, kiai pesantren, serta tokoh-tokoh yang memiliki otoritas keilmuan dan moral di lingkungan Nahdliyyin. Tidak jarang pula forum ini mengundang tenaga ahli yang kompeten di bidang tertentu untuk memberikan pandangan dan pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang. Kehadiran para ulama dan ahli tersebut menunjukkan bahwa muktamar tidak hanya bersifat organisatoris, melainkan juga sarat dengan dimensi keilmuan dan pertimbangan keagamaan. Dalam konteks ini, keputusan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat politis atau struktural, tetapi berangkat dari landasan fikih, etika sosial, dan kepentingan kemaslahatan umat.

Di dalam muktamar inilah berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kebangsaan yang berkembang di lingkungan NU dibahas secara mendalam. Diskusi yang berlangsung sering kali menyentuh isu-isu aktual yang dihadapi warga Nahdliyyin, baik dalam ranah pendidikan, dakwah, sosial-ekonomi, maupun hubungan NU dengan negara. Dari proses deliberasi tersebut kemudian lahir sejumlah keputusan penting yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh warga NU. Keputusan-keputusan itu tidak hanya mengikat secara organisatoris, tetapi juga membentuk arah gerak dan orientasi perjuangan NU dalam menghadapi dinamika zaman, sehingga muktamar dapat dipahami sebagai momentum strategis yang menentukan arah sejarah perjalanan organisasi.

Salah satu keputusan penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama lahir pada Muktamar ke-27 yang diselenggarakan di Situbondo pada tahun 1984. Dalam

3 Pengurus Wilayah NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama DIY, *Ke-NU-an: Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdhiyyah*, 2017.

forum tersebut ditegaskan bahwa Nahdlatul Ulama kembali kepada Khittah 1926, yakni kembali menempatkan diri sebagai organisasi keagamaan (jam'iyah diniyyah ijtima'iyah) dan tidak lagi terlibat secara langsung dalam politik praktis. Keputusan ini menjadi titik balik penting, mengingat sejak tahun 1952 NU telah terjun ke gelanggang politik praktis dengan menjadi partai politik dan kemudian terlibat dalam dinamika kepartaian nasional. Dengan demikian, putusan kembali ke Khittah 1926 bukan sekadar keputusan organisatoris, melainkan juga pergeseran orientasi perjuangan yang bersifat ideologis dan strategis.⁴

Implikasi dari keputusan tersebut terasa luas, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara nasional, NU harus menata ulang relasi kelembagaannya dengan dunia politik dan negara, sekaligus membangun kembali identitasnya sebagai kekuatan sosial-keagamaan. Di tingkat lokal, dampaknya tidak kalah signifikan, terutama di daerah-daerah dengan basis Nahdliyyin yang kuat seperti Tasikmalaya. Di wilayah ini, perubahan orientasi tersebut memengaruhi dinamika kepemimpinan, arah gerak organisasi, serta pola keterlibatan warga NU dalam kehidupan sosial dan politik setempat. Tasikmalaya menjadi salah satu contoh penting untuk melihat bagaimana keputusan Khittah 1926 direspons, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat Nahdliyyin.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tasikmalaya merupakan salah satu cabang NU yang memiliki akar historis kuat dalam perkembangan organisasi di tingkat nasional. Keberadaannya tidak terlepas dari proses ekspansi kelembagaan NU setelah berdirinya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Surabaya pada tahun 1926. Sebagai wilayah yang dikenal dengan basis pesantren dan tradisi keagamaan yang kokoh, Tasikmalaya menjadi lahan subur bagi

4 Nahdlatul Ulama Online, "Kantor Cabang NU Tasikmalaya Sejak Zaman Hindia Belanda," NU Online, diakses 20 Januari 2025, pukul 09.30 WIB, <https://www.nu.or.id/fragmen/kantor-cabang-nu-tasikmalaya-sejak-zaman-hindia-belanda>.

pertumbuhan NU sejak masa awal. Hal ini menunjukkan bahwa PCNU Tasikmalaya bukan sekadar kepanjangan struktural dari pusat, melainkan bagian integral dari jaringan perjuangan NU yang aktif mengawal misi organisasi, baik dalam bidang sosial-keagamaan maupun dalam dinamika politik yang pernah dijalani NU pada periode tertentu.

Keaktifan dan keterlibatan PCNU Tasikmalaya dalam berbagai aktivitas organisasi menjadikannya turut merasakan dampak langsung dari putusan Kembali ke Khittah 1926 pada Mukhtamar ke-27 tahun 1984. Perubahan orientasi NU dari politik praktis menuju peneguhan peran sebagai organisasi keagamaan membawa konsekuensi pada penataan ulang peran dan posisi PCNU di tingkat lokal. Dampak tersebut dapat dilihat dari dinamika hubungan antara ulama dan umat, perubahan pola keterlibatan politik warga Nahdliyyin, serta pergeseran fokus gerakan menuju bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kajian terhadap PCNU Tasikmalaya menjadi penting untuk memahami bagaimana keputusan Khittah di tingkat nasional diinternalisasi dan diimplementasikan dalam konteks sosial-politik lokal yang memiliki karakteristik tersendiri.⁵

5 Nahdlatul Ulama Online, “Kantor Cabang NU Tasikmalaya Sejak Zaman Hindia Belanda,” NU Online, diakses 20 Januari 2025, pukul 09.30 WIB, <https://www.nu.or.id/fragmen/kantor-cabang-nu-tasikmalaya-sejak-zaman-hindia-belanda>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini, dengan judul *Kondisi Sosial Politik Nahdhatul Ulama Tasikmalaya Pasca Muktamar Situbondo (1984)*, maka demikian diperlukan batasan masalah yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana kondisi sosial politik Nahdhatul Ulama Tasikmalaya pra-Muktamar Situbondo 1984?
2. Bagaimana kondisi sosial politik Nahdhatul Ulama Tasikmalaya pasca Muktamar Situbondo 1984?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui seperti apa kondisi sosial politik Nahdhatul Ulama Tasikmalaya pra Muktamar Situbondo 1984.
2. Untuk mengetahui seperti apa kondisi sosial politik Nahdhatul Ulama Tasikmalaya pasca Muktamar Situbondo 1984.

D. Kajian Pustaka

Penelusuran dari berbagai literatur terkait topik dilakukan penulis dengan tujuan melihat adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun tema-tema kajian yang berkaitan dengan tema penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Jurnal karya Fani Ahmad Ariwibowo (2013) yang berjudul *Partisipasi Politik Nahdhatul Ulama Pasca Muktamar Ke-27 di Situbondo tahun 1984-2010*. Dalam artikel jurnal tersebut dibahas bagaimana dampak politik praktis keputusan Khittah dalam cakupan yang lebih luas secara nasional, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah melengkapi kajian tersebut

denga perspektif lokal yang lebih mendalam dan spesifik, yaitu di daerah Tasikmalaya.

2. Artikel jurnal : Terbitan Laduni.ID (Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman) yang berjudul “Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-27. Situbondo, 8-12 Desember 1984”. Dalam artikel jurnal ini, dibahas beberapa persoalan atau permasalahan sosial keagamaan masyarakat pada masa itu. Berupa keputusan-keputusan ataupun respon terhadap problematika yang dihadapi masyarakat. Untuk melengkapi penelitian diatas, penulis hendak meneliti bagaimana dampak putusan-putusan penting tersebut sebagai jawaban atas persoalan dalam masyarakat. Salah satunya keputusan NU kembali ke Khittah.
3. Skripsi : Karya Dina Marlina (2006), yang berjudul “Mukhtar NU Ke-29 di Cipasung; studi Tentang Konflik Internal NU pasca Mukhtar”. Skripsi tersebut membahas mengenai konflik internal Nahdlatul Ulama. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penelitian dalam skripsi ini tidak menganalisis konflik dalam mukhtar secara menyeluruh, tetapi lebih kepada dampak setelah putusan - putusan dalam mukhtar tersebut ditetapkan. Yaitu ketika dalam Mukhtar Situbondo diputuskan bahwa Nahdlatul Ulama kembali ke ‘Khittah’ yang memiliki makna kembali pada nilai – nilai dasar pendirian Nahdlatul Ulama sebagai ‘Jamiyyah Diniyyah’ dan bukan sebagai organisasi politik praktis. Tentu saja keputusan ini membawa perubahan bagi Nahdlatul Ulama itu sendiri, terutama dalam bidang social politik, baik itu secara nasional ataupun lokal. Dalam tulisan inilah penulis akan meneliti bagaimana perubahan ataupun keadaan sosial politik Nahdlatul Ulama Tasikmalaya pasca putusan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode Penelitian Sejarah merupakan serangkaian proses atau cara yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman ataupun peninggalan dari masa lalu. Metode sejarah ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.⁶

1. Heuristik

Tahapan heuristik yaitu proses mencari, menentukan dan menghimpun sumber-sumber sejarah.⁷ Pada tahap ini, penulis menggunakan salah satu jenis sumber sejarah, yaitu sumber tertulis. Dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber, penulis melakukan studi kepustakaan di beberapa perpustakaan secara daring dan luring, seperti website Perpustakaan Nasional dan website resmi Nahdhatul Ulama. Sumber-sumber yang didapat dalam penelitian ini berupa buku-buku, surat kabar, artikel jurnal, dan arsip-arsip serta skripsi.

Adapun sumber-sumber yang dijadikan acuan utama atau sumber primer dalam penelitian ini adalah :

a) Arsip

- 1) Surat surat mengenai pelaksanaan kampanye usaha pemenangan dan persiapan pemilu dari partai NU dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 9 Februari 1953 - 27 Oktober 1977.
- 2) Surat surat mengenai pencalonan, pemilihan, dan pelantikan anggota DPR, konstituante dan MPR dari NU dan PPP. 29 April 1954 - 25 Juli 1977.
- 3) Surat surat mengenai hasil pemilu 1955, 1971, dan 1977 di beberapa daerah. 12 Oktober 1955 - 4 November 1977.
- 4) Pernyataan PBNU tentang ajakan untuk berjalan diatas landasan demokrasi dan UUD 1945 demi suksesnya pelita dan pemilu.

6 Kuntowijoyo, (1994). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana.

7 Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

- 5) Surat dari PBNU kepada PCNU Sumbawa Besar mengenai perubahan NU menjadi partai politik. 07 Februari 1953.
- 6) Buku Petunjuk Mukhtar NU ke-27.
- 7) Bunga Rampai Mukhtar NU ke-27.
- 8) Surat dari PCNU Tasikmalaya untuk Ketua Umum PBNU.
- 9) Hasil – hasil Mukhtar ke-29 Nahdlatul Ulama.
- 10) Program Pokok Pengembangan NU 1994-1999.
- 11) SK PBNU No. 064/A.IId/XII/95 “Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya Masa Khidmah 1995-2000”.
- 12) Pokok- pokok Pikiran Pmeulihan Khittah NU 1926.

b) Surat Kabar

- 1) TEMPO Publishing, *Nahdlatul Ulama dan Polemik Asas Tunggal*, 31 Desember 1983.
- 2) TEMPO Publishing, *Perjalanan Nahdlatul Ulama dalam Perpolitikan Indonesia*, 15 Maret 1980.
- 3) Bambang Harymurti dan Ahmad Luqman, Laporan biro-biro, *Partai Islam : Perpecahan nahdlatul Ulama, Dianggap Jalan memecah Suara*, 11 April 1987.
- 4) Klipping Mukhtar NU Ke-27
- 5) Majalah Aula “Risalah Nahdlatul Ulama” dari tahun 1986-1995.
- 6) Harian Media Indonesia, “Kisah Perjalanan Politik Aliran”, tahun 1997.

Adapun untuk sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya :

a) Buku

- 1) Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama Jilid I*, 2017.
- 2) Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama Jilid II*, 2017.
- 3) Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama Jilid III*, 2017.

- 4) Agung Rulianto, Adi Mawardi, *Abdurrahman Wahid dan Kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926*, Tempo Publishing, 2004.
- 5) Mohamad Sobary, *NU dan Keindonesiaan*, 2010.
- 6) Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A, *NU Moderatisme dan Pluralisme, Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Kebangsaan*.
- 7) Data Tempo, *Catatan Langit Untuk Muktamar NU*.
- 8) Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna di Tengah Prahara*, Pengantar : Robert W.Hefner, 2017.
- 9) Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik*, 1984.
- 10) Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, 1999.
- 11) Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*.
- 12) Abdul Wahib, dkk, Materi Dasar Nahdlatul Ulama Ahlussunnah WALjamaah, LP Ma'arif NU Jawa Tengah. 2004.
- 13) Barton, Greg, dan Greg Fealy (eds). Tradisionalisme Radikal. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- 14) Bunyamin, A.E. Nahdlatul Ulama di Tengah-tengah Perjuangan Bangsa Indonesia. Tasikmalaya, 2013.
- 15) Fealy, Greg. Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967. LKiS, 1998.
- 16) Greg Barton. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. UNSW Press, 2002.
- 17) Hefner, Robert W. Civil Islam: Islam and Democratization in Indonesia. Princeton University Press, 2000.
- 18) Herlina Lubis, Nina. Tradisi dan Transformasi Sejarah Sunda. Bandung: Humaniora, 2000.
- 19) Lip D. Yahya. Ajengan Cipasung: Biografi KH Moh. Ilyas Ruhiat. Bekasi: Alif.id, 2021.
- 20) Lip D. Yahya. Ajengan Sukamanah: Biografi KH. Zainal Musthafa. Tasikmalaya, 2021.

- 21) Ichwan, Moch. Nur. Ulama, State and Politics. UIN Jakarta, 2001.
- 22) Ichwanuddin, M. NU dan Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES, 1999.
- 23) Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- 24) Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. 2018.
- 25) Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942. Jakarta: LP3ES, 1982.
- 26) Pengurus Wilayah NU. (2017). Ke-NU-an: Ahlul Sunnah Wal Jamaah An-Nahdhiyyah. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama DIY.
- 27) Shidiq, Ahmad. Khittah Nahdliyyah. Surabaya: Khalista, 2006.
- 28) Sulasman. Metode Penelitian Sejarah. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- 29) Sujati, Budi, dan Ajid Thohir. Sejarah Nu Jawa Barat. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- 30) Suryono, Agus. Teori dan Strategi Perubahan Sosial. 2019.
- 31) Van Bruinessen, Martin. NU: Traditional Islam in Indonesian Politics. LKiS Pelangi Aksara, 1992.
- 32) Zuhri, Saifuddin. Berangkat dari Pesantren. Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- b) Skripsi
- 1) Dina Marlina (2006), *“Muktamar NU Ke-29 di Cipasung; studi Tentang Konflik Internal NU pasca Muktamar”*.
- 2) Rina Andriani Hidayat (2007), *“Respon Partai Nahdhatul Ulama (PNU) terhadap Kebijakan Politik Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin”*.
- c) Artikel Jurnal
- 1) Fani Ahmad Ariwibowo (2013) *Partisipasi Politik Nadlatul Ulama Paska Muktamar Ke-27 Di Situbondo Tahun 1984-2010*.

- 2) Artikel jurnal : Terbitan Laduni.ID (Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman) yang berjudul “*Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27. Situbondo, 8-12 Desember 1984*”.

2. Kritik

Tahap kedua adalah kritik atau verifikasi yaitu proses menyeleksi sumber. Tahapan kritik ini terbagi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Adapun dalam melaksanakan tahapan kritik ekstern terhadap sumber yang didapat, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

a) Arsip

Kritik ekstern yang dilakukan penulis terhadap sumber primer berupa arsip untuk menentukan otentisitas sumber yang diteliti adalah dengan menjawab dari 3 pertanyaan dasar, yaitu 1) Otentik atau tidak?, 2) Utuh atau tidak?, dan 3) Asli atau palsu. Penulis melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber, berarti juga menyeleksi dari segi fisik sumber yang ditemukan.

b) Surat kabar

Dalam menguji otentisitas surat kabar yang dijadikan sumber, penulis menguji sumber tersebut berdasarkan 5 pertanyaan pokok, yaitu 1) Kapan sumber itu dibuat?, 2) Dimana sumber dibuat?, 3) Siapa yang membuat?, 4) Dari bahan apa sumber dibuat?, dan 5) Apakah sumber itu dalam bentuk asli? Untuk menguji sumber berupa buku, penulis menguji dari sisi siapa yang menulis buku tersebut. Maksudnya buku yang penulis dapatkan telah diteliti siapa penulisnya, apakah sejalan dengan ketika muktamar ke-27 di Situbondo diadakan, ataukah orang yang terlibat dalam muktamar tersebut.

Sedangkan dalam melaksanakan tahapan kritik intern terhadap sumber yang didapat, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Arsip

Kritik intern terhadap arsip yang penulis temukan adalah dengan menyaring data dan fakta dengan melakukan penyeleksian data dan fakta

kemudian disesuaikan dengan rentang tahun peristiwa yang penulis teliti. Selain itu, untuk menentukan kredibilitas sumber tersebut, penulis meneliti siapa yang mengeluarkan sumber tersebut, sehingga dapat ditentukan apakah sumber tersebut dapat dipercaya ataupun tidak. Hasilnya, penulis menemukan beberapa sumber yang relevan dan dapat digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan ini, diantaranya yaitu :

- 1) Klipping Mukhtar NU Ke-27, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asembagus, Situbondo. Dalam klipping tersebut, berisi catatan-catatan pelaksanaan Mukhtar Situbondo yang diantaranya terdapat peta lokasi yang digambar dengan tulisan tangan. Hal ini sesuai dengan keadaan pada tahun 1984, dimana pada masa itu penggunaan alat cetak masih sangat terbatas.
- 2) Surat – surat masuk dan keluar dari PBNU pada rentang tahun 1953-1980an. Surat tersebut dapat dipastikan kredibilitasnya karena penulis mengaksesnya langsung dari ANRI.
- 3) Surat-surat PCNU Tasikmalaya yang ditujukan kepada PBNU. Salah satunya ketika Ajengan Ilyas meminta pendapat kepada GusDur mengenai peristiwa Golkarisasi Cipasung. Surat tersebut dapat dipastikan kredibel, karena penulis menemukan dalam lampiran buku yang ditulis oleh Iip D. Yahya, dimana beliau dalam keterangannya, mendapatkan sumber tersebut dari arsip di Pesantren Cipasung.

b. Surat kabar

Dalam menguji kredibilitas sumber yang penulis temukan berupa surat kabar, penulis meneliti dari segi siapa yang menulis sumber tersebut, kemudian mencari informasi mengenai tahun dikeluarkannya, sehingga dapat ditentukan sumber tersebut kredibel atau tidak maupun dapat dipercaya atau tidak. Diantara sumber yang penulis temukan adalah Majalah Aula, dimana majalah tersebut dikeluarkan sesuai rentang tahun yang penulis teliti, yaitu tahun 1988-1991.

3. Interpretasi

Dalam metode sejarah, terdapat tahapan interpretasi, dimana pada tahapan ini penulis melakukan penafsiran terhadap sumber. Metode utama dalam tahapan interpretasi adalah analisis dan sintesis. Penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang sudah terkumpul untuk meminimalisir subyektifitas. Dengan demikian, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sebagai ilmu bantu. Untuk hasil yang maksimal dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sosiologi dalam upaya menafsirkan fakta – fakta sejarah, penulis menggunakan teori hegemoni Gramsci. Ia mengartikan hegemoni sebagai kemampuan kelompok dominan untuk memimpin masyarakat melalui kultural daripada paksaan. Teori ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana ulama NU berupaya untuk menanamkan nilai-nilai keislaman NU dalam kehidupan masyarakat melalui dakwah, pendidikan, dan tradisi keagamaan. Hal ini kemudian dapat membuktikan bahwa penarikan diri NU dari politik praktis adalah untuk berfokus pada peran kultural dan sosial.

4. Historiografi

Tahapan ke empat dalam metode sejarah adalah historiografi, atau tahapan penulisan sejarah, mencakup cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Adapun dalam penulisan ini, penulis berencana untuk membaginya menjadi empat bab.

- a. Bab I atau Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.
- b. Bab II mulai masuk pada bagian pembahasan mengenai kondisi sosial politik Nahdhatul Ulama Tasikmalaya pra Mukthamar Situbondo 1984. Dalam bab ini dibahas mengenai seperti apa perjalanan NU Tasikmalaya dalam aspek sosial politik lokal sebelum putusan Khittah 1926.

- c. Bab III menguraikan kondisi sosial politik Nahdhatul Ulama Tasikmalaya pasca Mukhtamar Situbondo 1984, dimana pada bab ini dibahas mengenai perjalanan NU Tasikmalaya Pasca kembali ke khittah 1926, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan bukan organisasi politik.
- d. Bab IV yaitu Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan penulisan.

